

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan penggerak perekonomian Indonesia karena kebanyakan para pelaku usaha tersebut bermula dari industri keluarga atau home industry. Konsumennya pun berasal dari berbagai kalangan khususnya menengah ke bawah. Peranan UMKM terutama saat krisis *Financial Global* tahun 2008 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses recovery ekonomi nasional, baik upaya menahan gejolak krisis dan menopang perekonomian maupun mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Sebagai kelompok usaha kecil, UMKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi. Peran utama keberadaan dan pertumbuhan UMKM pada umumnya dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembagian pendapatan (Divianto & Febrianty, 2017)

Pada umumnya UMKM menghasilkan produk barang dan jasa yang dekat dengan masyarakat, pendapatan yang merosot ketika krisis ekonomi terjadi tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal baik untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku hingga peralatan, artinya tidak mengandalkan barang impor. (Meryana., 2017).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital mencapai 12 juta lebih per Juni 2021, atau baru 19% dari UMKM nasional. Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 30 juta pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Jumlah tersebut naik 1,98% jika

dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sementara, usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Secara rinci, sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro. Jumlahnya setara dengan 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil. Proporsinya sebesar 1,22% dari total UMKM di dalam negeri. Sementara, usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit. Jumlah itu memberi andil sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia (dataindonesia.id, 2021).



Sumber: Kemenkop UMKM

GPerkembangan UMKM Indonesia (Tahun 2011-2020)

Usaha mikro telah menurun dari 48 persen pada Maret-April 2020 menjadi lima persen periode yang sama tahun 2021. Sementara itu, penutupan usaha kecil menurun dari 54,4 persen menjadi 1,8 persen, dan penutupan usaha menengah menurun dari 31,3 persen menjadi 6,3 persen. Pada periode yang sama 2021, usaha kecil dari 40 persen menjadi 68,7 persen, dan usaha menengah dari 43,8 persen menjadi 64,6 persen. Tahun 2022 Menteri Koperasi dan UMKM mencatat 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Jumlah ini masih kurang 11 juta dari target 30 juta UMKM go digital

di 2024. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM mengatakan total omzet dari keseluruhan UMKM yang go digital mencapai Rp500 triliun hingga Rp600 triliun (dataindonesia.id, 2021).

Perkembangan UMKM di Sumatera Barat mengalami progres kemajuan UMKM yang dikembangkan pemerintah daerah maupun Dinas Koperasi dan UMKM. Wilayah Sumatra Barat merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang signifikan. Pertumbuhan ini dibuktikan dengan data Dinas Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa di provinsi ini tercatat sebanyak 108.558 UMKM aktif pada tahun 2017, jumlah ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 110.201 dan tahun 2019 menjadi 112.458 UMKM (Sumbar.bps.go.id, 2020). Namun, perkembangan dan kinerja UMKM ini berpotensi terhambat karena adanya pandemi global yang terjadi pada tahun 2020 (Hartami, 2020).

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki perkembangan UMKM yang pesat. Begitu pentingnya UMKM maka upaya pengembangan UMKM sangat diharapkan agar semakin dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Padang. Dari informasi yang penulis peroleh dari UMKM kota Padang, diperoleh informasi bawa jumlah UMKM yang tertulis di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Table 1.1 Daftar UMKM di Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Padang Barat	300
2	Padang Timur	270
3	Padang Selatan	330
4	Koto Tangah	360
5	Lubuk Begalung	420
6	Pauh	269

7	Lubuk Kilangan	210
8	Kuranji	270
9	Padang Utara	210
10	Nanggalo	134
11	Bungus Teluk Kabung	180
Jumlah		2953

Sumber: Dinas Koperasi & UMKM Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Kota Padang yang terdiri atas 11 Kecamatan memiliki 2.953 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Badan Pusat Statistik (2020) menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya mengambil berbagai kebijakan untuk mengembangkan UMKM. Menurut Yunisman (2020) dalam harian minangkabau news, Pemerintah masih memberikan pelatihan atau bimbingan kepada para pengusaha UMKM lebih lanjut Bapak Yunisman selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan produknya dengan memberikan pelatihan agar SDM juga meningkat.

Salahsatu UMKM yang ada di pusat kota Padang adalah kawasan Pondok Kecamatan Padang Barat, berdasarkan data yang peneliti peroleh pada tahun 2022 ini jumlah UMKM yang ada di kawasan Pondok terdapat 260 UMKM, terdiri dari berbagai jenis UMKM seperti perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta dan industri pengolahan. UMKM yang bergerak di bidang perdagangan adalah fashion, dengan fokus bisnis pada usaha penjualan pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh produsen pakaian atau produksi sendiri tetapi yang memiliki pangsa pasar anak muda. Selain itu UMKM berkembang lainnya yaitu kuliner yang berpusat di kawasan Pondok (BPS, 2022).

Namun dalam perkembangan UMKM yang signifikan di kawasan Pondok memiliki masalah utama dalam pengelolaan laporan keuangan. Pengelolaan yang baik memerlukan

keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku UMKM sedangkan kenyataannya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pelaku UMKM (pembuat laporan keuangan di UMKM) masih belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Raditya (2017) menyatakan bahwa kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik memaksa berbagai instansi pemerintah untuk mendorong peningkatan prestasi kerja yang prima.

Penyusunan laporan keuangan yang didasari oleh standar akuntansi keuangan termasuk bukti meningkatnya proses penyajian laporan keuangan yang efeknya adalah peningkatan kepercayaan pada laporan keuangan. Entitas Mikro, Kecil, Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas public yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Nursalim & Junaidi, 2019).

Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan haruslah memiliki kualitas karena penafsiran dari laporan keuangan ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Agar kualitas pengambilan keputusan meningkat, maka informasi yang disajikan juga harus berkualitas. Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan (SAK No. 24, 2007).

Ketidakmampuan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas juga merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen. Kelemahan ini merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan UMKM dalam mengembangkan usaha. Padahal laporan keuangan yang berkualitas merupakan bagian dari akuntansi yang menjadi salah satu komponen mutlak yang harus dimiliki UMKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan

modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas harus ditumpuhkan dikalangan UMKM. Sedangkan, rendahnya minat para pelaku UMKM fashion ini dalam mengutamakan kualitas pada laporan keuangan terbukti dari penelitian ke beberapa UMKM (Razannisa, 2016).

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di kawasan Pondok, sekian banyak UMKM yang berdiri masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum menggunakan laporan keuangan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi serta memperhatikan aspek-aspek penting didalamnya akan berguna untuk pemilik menentukan keputusan dikemudian hari.

Selain itu, observasi peneliti, pemilik UMKM fashion mengatakan beberapa faktor penyebab tidak memperhatikan kualitas dalam menyusun laporan keuangan, antara lain: pemilik mengaku malas membuat laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan hanya digunakan olehnya dan mengaku jika tidak mempunyai waktu membuat laporan keuangan yang berkualitas, karena mereka lebih memikirkan hal lain yang jauh lebih penting seperti peningkatan omset perbulan, mereka juga yang telah memiliki karyawan dibidang akuntansi, tetapihanya membuat laporan keuangan berdasarkan kebutuhan perusahaan, selain itu pengguna informasi laporan keuangan lebih berminat untuk mengetahui omset perbulan, pengeluaran perbulan, penjualan perbulan, kredit, piutang/utang, serta tren masa lalu badan usaha dalam menghasilkan laba daripada informasi yang membantu merencanakan arus kas, pendapatan, likuiditas, kekuatan neraca dan nilai perusahaan di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy (2016) menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kebutuhan dalam

penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Sedangkan pelaporan yang dibuat meliputi laporan penjualan, pembelian, persediaan dan penggajian. Kendala yang menghambat UMKM dalam penerapan akuntansi antara lain adalah latar belakang pendidikan, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi dan belum ada kebutuhan terhadap penerapan akuntansi (Deddy, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati & Hermawan, (2018) didapatkan hasil bahwa tidak secara sistematis akuntansi, dan pengetahuan akuntansi mereka hanya sekedar sederhana yang mereka tahu sampai jenjang pendidikan terakhir mereka. Penyusunan laporan keuangan mereka hanya menyusunnya sebatas yang mereka tahu tanpa memisahkan kedalam bentuk-bentuk laporan seperti neraca, laba/rugi, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Para pelaku merasa nyaman dengan laporan atau pembukuan sederhana yang mereka buat sendiri dan tidak membuatnya secara akuntansi yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Zantika (2019) didapatkan hasil bahwa Terdapat pengaruh Persepsi atas Tujuan Laporan Keuangan terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Kerajinan di Kabupaten Bantul. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al., (2019) didapatkan hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap persepsi kemudahan implementasi akuntansi di usaha mikro, kecil dan menengah di kecamatan panti. Hal ini menunjukkan adanya signifikan tinggi dalam hasil penelitian.

Penelitian ini masih diperlukan adanya kebaruan yang yang dapat meningkatkan pengetahuan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan agar relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas

maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Persepsi Pemilik Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kawasan Pondok”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah persepsi pemilik berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM di Kawasan Pondok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi pemilik terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM di Kawasan Pondok.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Bagi Penulis

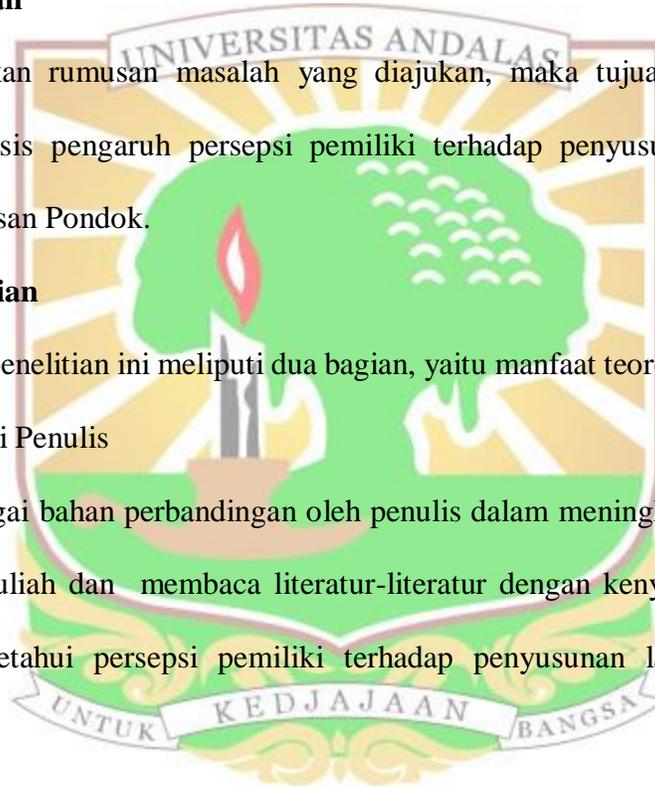
Sebagai bahan perbandingan oleh penulis dalam meningkatkan wawasan selama di bangku kuliah dan membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada untuk mengetahui persepsi pemilik terhadap penyusunan laporan keuangan pada UMKM.

2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian lain yang berminat mengembangkan topik pembahasan ini dan melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Manfaat Bagi UMKM

a. Bagi UMKM



Diharapkan hasil ini dapat memberikan sumbangan fikiran atau sebagai bahan masukan untuk mengetahui manfaat penerapan akuntansi pada UMKM, dan memudahkan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Khususnya kawasan Pondok untuk mengintensifkan penyelenggaraan sosialisasi dan penerapan SAK EMKM pada UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I. Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II. Merupakan bab tinjauan literatur yang menerangkan penjabaran dari teori-teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini

BAB III. Merupakan bab yang menerangkan jenis penelitian serta tahapan dalam melakukan penelitian.

BAB IV. Merupakan bab pembahasan hasil penelitian secara komprehensif serta analisa dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V. Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian selanjutnya.

